

Pelaksanaan Pendidikan Politik di SMAN 4 Kerinci melalui Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Muhammad Tegar Fredy, Al Rafni, Suryanef, Irwan
Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
FIS Universitas Negeri Padang

Corresponding Author: **Al Rafni**
E-mail: alrafni@fis.unp.ac.id

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pendidikan politik di SMA Negeri 4 Kerinci melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Apa faktor penghambat dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat dalam pelaksanaan pendidikan politik melalui pembelajaran PPKn. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling. Informan guru PPKn, kepala sekolah, wakil kurikulum dan siswa kelas XI. Data didapatkan dengan metode observasi, wawancara dan studi dokumentasi yang selanjutnya diuji keabsahannya dengan menggunakan teknik triangulasi sumber. Data kemudian dianalisis dengan cara mereduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pendidikan politik di SMA Negeri 4 Kerinci melalui pembelajaran PPKn belum optimal dalam rangka mewujudkan warga negara yang melek politik, kesadaran politik dan keterampilan politik yang tinggi. Faktor penghambat dalam pelaksanaan pendidikan politik melalui pembelajaran PPKn yakni keterbatasan sumber belajar yang hanya terfokus pada buku teks dan Lembar Kerja Siswa, keterbatasan sarana dan prasarana sehingga guru sulit mengembangkan media pendidikan politik dalam pembelajaran PPKn. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat dalam pelaksanaan pendidikan politik ialah Pertama, guru harus lebih kreatif dalam mencari sumber belajar dari berbagai media massa. Kedua, guru harus lebih kreatif dan inovatif serta selektif dalam menggunakan berbagai metode dan media pendidikan politik dalam pembelajaran PPKn.

Kata Kunci: pendidikan politik, PPKn, demokrasi, politik

ABSTRACT

This article aims to find out how the implementation of political education at SMA Negeri 4 Kerinci through learning Pancasila and Citizenship Education (PPKn). What are the inhibiting factors and the efforts made in overcoming the inhibiting factors in the implementation of political education through PPKn learning. This research was conducted with a qualitative approach with a descriptive method. Determination of informants using purposive sampling technique. PPKn teacher informants, school principals, curriculum representatives and class XI students. The data were obtained by means of observation, interviews and documentation studies which were then tested for validity using source triangulation techniques. The data is then analyzed by reducing the data, presenting the data and drawing conclusions. The results showed that the implementation of political education in SMA Negeri 4 Kerinci through Civics learning can be seen from the implementation of political education through Civics learning that was not optimal in order

to create citizens who have political discourse literacy, political awareness and high political skills. The inhibiting factors in implementing political education through Civics learning are limited learning resources that only focus on textbooks and Student Worksheets, limited facilities and infrastructure so that teachers find it difficult to develop political education media in Civics learning. Efforts made in overcoming the inhibiting factors in the implementation of political education are First, teachers must be more creative in finding learning resources from various mass media. Second, teachers must be more creative and innovative as well as selective in using various methods and media for political education in Civics learning.

Keywords: *political education, citizenship education, democracy, politics*



This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
©2022 by author.

Received: Jan 03 2022

Revised: Apr 13 2022

Accepted: Jun 04 2022

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan tuntutan wajib yang harus dikejar dan dilalui oleh manusia modern. Melalui pendidikan, berbagai ilmu dan pengetahuan penting yang dapat diterapkan dalam kehidupan sosial. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Pasal 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa "Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara".

Jadi, tujuan pendidikan nasional adalah untuk menjabarkan kualitas masyarakat Indonesia yang harus ditingkatkan oleh setiap sektor pendidikan. Begitu pun siswa, siswa merupakan sumber daya manusia yang harus dikembangkan. Siswa merupakan faktor terpenting dalam perkembangan masyarakat Indonesia. Dalam hal ini peran pendidikan sangat dibutuhkan, karena pendidikan

merupakan alat yang digunakan untuk mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berguna bagi bangsa dan negara.

Bagi bangsa Indonesia yang menganut sistem politik berlandaskan Pancasila, pendidikan politik Pancasila bagi generasi muda sangat diperlukan untuk lebih memantapkan sistem politik tersebut. Dengan pendidikan politik yang baik diharapkan generasi muda semakin sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, mampu memahami dan menanamkan budaya politik yang baik. Untuk itu pembinaan generasi muda dibidang politik merupakan bagian yang sangat penting dari keseluruhan proses pembangunan nasional, sehingga penanganannya menjadi tanggung jawab bersama.

Pendidikan politik dapat memberikan pemahaman kepada siswa tentang nilai-nilai, simbol simbol, keyakinan-keyakinan, pandangan-pandangan tentang sistem politik melalui proses dialogik, terbuka, kritis, rasional atau penyadaran. Dengan adanya pendidikan politik tersebut

diharapkan dapat meningkatkan kesadaran warga negara untuk berpartisipasi dalam kehidupan bernegara. Salah satu upaya untuk membina generasi muda di bidang politik, yaitu dengan mempersiapkan sejak awal, terutama sejak duduk di bangku sekolah. Melalui pendidikan politik di sekolah, peserta didik akan memperoleh banyak pengetahuan tentang dunia politik dan peranan mereka di dalamnya. Sekolah memiliki peran penting dalam pembentukan sikap dan perilaku demokratis pada diri siswa.

Pembentukan sikap siswa yang memiliki sikap kritis, kreatif, partisipasi, demokratis, bertanggung jawab inilah yang diharapkan dapat mendorong efektivitas sistem politik demokrasi di Indonesia sesuai dengan misi mata pelajaran PPKn sebagai pendidikan politik. Mata pelajaran PPKn sebagai pendidikan politik ini sangat berperan dalam upaya untuk membina warga negara yang berbudaya politik yang matang. Mereka tidak hanya tahu akan hak dan kewajibannya sebagai seorang warga negara, akan tetapi mereka akan bersikap dan berpenilaian yang dapat mendukung terwujudnya sistem politik nasionalnya.

Dalam pembelajaran PPKn terdapat materi mengenai politik yaitu sistem dan dinamika demokrasi Pancasila pada KD 2.2 berperilaku santun dalam berdemokrasi Pancasila sesuai dengan UUD 1945, khususnya bagi siswa kelas XI. Diharapkan dalam diberikannya materi tentang politik untuk siswa, dapat membentuk sikap dan perilaku manusia yang baik, yang disisipkan melalui nilai-nilai demokrasi dan kemudian akan berwujud menjadi sikap dan perilaku

demokrasi dalam kehidupan sehari-hari disekolah. Kehidupan yang demokratis perlu dikenal, dipahami, diinternalisasi, dan diterapkan demi terwujudnya pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi.

Warga negara yang demokratis sebagai pendukung terwujudnya demokrasi yang stabil tidak akan terbentuk dengan sendirinya, akan tetapi perlu diusahakan secara terencana, sistematis, terprogram, dan terus menerus terutama lewat pendidikan politik secara formal melalui pembelajaran PPKn. Dengan demikian, pemahaman mengenai pentingnya pendidikan politik bagi siswa harus diberikan, mengingat dalam pendidikan politik tidak sekedar pemberian teori mengenai politik, tetapi juga harus mengetahui cara untuk mengimplementasikannya dalam aktivitas politik. Hal ini dimaksudkan agar siswa memiliki pengetahuan politik, kesadaran politik, sikap, nilai, orientasi, dan mampu berperan dalam membawa perubahan ke arah yang positif baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat.

Sebagaimana menurut pandangan Cogan (dalam Elly Hasan, 2016:12) yang mengartikan PPKn adalah suatu mata pelajaran dasar di sekolah yang dirancang untuk mempersiapkan warga negara muda, agar kelak setelah dewasa dapat berperan aktif dalam masyarakatnya. Selain aktif dalam masyarakat, keberadaan generasi muda merupakan aset yang berharga dalam kancah perpolitikan, sebab mereka adalah tunas-tunas harapan bangsa yang akan melangsungkan kehidupan bangsa dan negara.

Keberhasilan pelaksanaan pendidikan politik dalam pembelajaran PPKn tidak akan terlepas dari peran guru. Guru PPKn merupakan aktor sosialisasi politik di sekolah yang berkewajiban untuk memberikan pendidikan politik yang rasional, cerdas, dan santun kepada peserta didik. Oleh karena itu, guru PPKn dituntut untuk memahami dan menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran PPKn serta mampu menggunakan berbagai metode pembelajaran yang demokratis, partisipatif, dan menyenangkan bagi peserta didik dalam mencapai tujuan pendidikan politik.

Salah satu permasalahan yang peneliti temukan di SMAN 4 Kerinci kelas XI adalah bahwa mata pelajaran PPKn merupakan sebuah wahana dalam melaksanakan pendidikan politik disekolah agar siswa-siswi memahami politik dengan baik, memiliki kemelekan politik, kesadaran politik dan keterampilan politik yang tinggi tetapi dalam pelaksanaannya belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari mata pelajaran PPKn yang masih menjadi momok yang membosankan di kalangan siswa karena proses pembelajaran yang berorientasi semata-mata kepada penguasaan isi dari materi. Guru yang masih menggunakan metode konvensional yaitu metode ceramah yang dimana dengan metode tersebut tidak adanya ruang bagi siswa untuk mengepresikan nilai-nilai dari materi dan juga terbatasnya media pendidikan politik yang digunakan guru dalam pelaksanaan pendidikan politik melalui pembelajaran PPKn.

Beberapa hasil penelitian terdahulu dilakukan oleh Elly Hasan Sadeli, (2016) yang berjudul Pengaruh pembelajaran PKn dalam membina melek politik siswa SMAN 2 Purwokerto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, pembelajaran PKn yang menggunakan berbagai variasi metode pembelajaran yang demokratis semakin memperkuat pengaruh PKn dalam membina melek politik siswa. Kedua, semakin baik kualitas kompetensi kewarganegaraan yang dimiliki oleh seorang siswa, maka semakin tinggi pula tingkat melek politik mereka. Ketiga, pembelajaran PKn yang efektif dan bermakna serta didukung oleh kualitas kompetensi kewarganegaraan yang baik, secara langsung dapat meningkatkan tingkat melek politik siswa.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Asmika Rahman, dkk, (2019), yang berjudul pelaksanaan pendidikan politik melalui pembelajaran PPKn untuk meningkatkan kesadaran politik siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pendidikan politik melalui pembelajaran PPKn menggunakan kurikulum 2013, guru yang profesional, serta tersedianya sarana dan prasarana dapat meningkatkan kesadaran politik siswa. Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Yohanes Berkhmas Mulyadi, dkk, (2019), yang berjudul Pendidikan Politik Melalui Pembelajaran PKn Untuk Meningkatkan Kesadaran Politik Siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk meningkatkan kesadaran politik siswa, dibutuhkan pendidikan politik dalam bentuk bermain peran, diskusi, pembelajaran berbagai sumber.

Pendidikan politik memegang peranan penting untuk dapat mendidik siswa-siswi agar mendapat pemahaman yang jelas terhadap berbagai konsep politik, terutama dalam membentuk kemelekan politik, kesadaran politik dan keterampilan politik yang tinggi. Pendidikan politik menjadi sarana bagi para siswa-siswi untuk mematangkan pemahamannya terhadap orientasi politik yang mesti dimiliki untuk dapat membentuk kemelekan politik, kesadaran politik serta keterampilan politik yang tinggi.

Sebab pada usia ini masa-masa yang paling menentukan dalam proses pendidikan seorang individu karena dalam usia ini ia mencoba menyerap berbagai konsep keilmuan dan mengaplikasikannya secara langsung dalam lingkungan sekolah maupun masyarakat. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas artikel ini bertujuan mengungkapkan bagaimana pelaksanaan pendidikan politik di SMA Negeri 4 Kerinci melalui pembelajaran PPKn. Apa faktor penghambat dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat dalam pelaksanaan pendidikan politik di SMA Negeri 4 Kerinci melalui pembelajaran PPKn.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. Informan penelitian pada penelitian ini yaitu kepala Sekolah, Wakil Kurikulum, Guru PPKn serta siswa kelas XI SMA Negeri 4 Kerinci. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Menurut Sugiyono (2013:241)

triangulasi merupakan Teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada. Uji keabsahan data dilaksanakan dengan triangulasi sumber. Sedangkan analisis data melalui tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hal ini penulis gunakan untuk melihat bagaimana pelaksanaan, apa faktor penghambat dan upaya dalam Pelaksanaan Pendidikan Politik di SMA Negeri 4 Kerinci Melalui Pembelajaran PPKn.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pendidikan Politik Melalui Pembelajaran PPKn

a. Materi Pendidikan Politik

Menurut Budimansyah dan Suryadi (dalam Pangalila,2017:92), PKn merupakan salah satu bidang kajian yang mengemban misi nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia melalui koridor "valuebased education". Konfigurasi atau kerangka sistematis PKn dibangun atas dasar paradigma sebagai berikut: *Pertama*, PKn secara kurikuler dirancang sebagai subjek pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi individu agar menjadi warga negara Indonesia yang berakhlak mulia, cerdas, partisipatif, dan bertanggung jawab.

Kedua, PKn secara teoretik dirancang sebagai subjek pembelajaran yang memuat dimensi-dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik yang bersifat konfluen atau saling berpenetrasi dan terintegrasi dalam konteks substansi ide, nilai, konsep, dan moral Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis, dan bela negara. *Ketiga*, PKn secara programatik

dirancang sebagai subjek pembelajaran yang menekankan pada isi yang mengusung nilai-nilai (content embedding values) dan pengalaman belajar (learning experience) dalam bentuk berbagai perilaku yang perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan tuntutan hidup bagi warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagai penjabaran lebih lanjut dari ide, nilai, konsep, dan moral Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis, dan bela negara.

Sebagaimana menurut pandangan Cogan (dalam Hasan, 2016:12) yang mengartikan PKn atau civic education sebagai "...the foundational course work in school designed to prepare young citizens for an active role in their communities in their adult lives", maksudnya adalah suatu mata pelajaran dasar di sekolah yang dirancang untuk mempersiapkan warganegara muda, agar kelak setelah dewasa dapat berperan aktif dalam masyarakatnya. Selain aktif dalam masyarakat, keberadaan generasi muda merupakan aset yang berharga.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa di dalam proses pembelajaran PPKn guru menyampaikan materi secara teori seperti menyampaikan perilaku yang sesuai dengan demokrasi Pancasila, tidak mengaitkan dengan kondisi yang ada di lingkungan siswa sehingga materi yang disajikan guru tidak meresapi kedalam diri siswa hanya sekedar pengetahuan saja. Dalam hal ini guru berperan sebagai penyampai nilai-nilai serta pandangan-pandangan politik dan juga sebagai kreator budaya belajar, karena pada kenyataannya budaya belajar siswa di kelas secara tidak langsung akan menimbulkan

akibat politik. Siswa tahu akan hak dan kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik dalam kehidupan sekolah, masyarakat, bangsa dan negara.

b. Metode Pendidikan Politik

Menurut Soenarjati dan Cholisi (dalam Ainun, M.2017:184) metode adalah suatu cara yang dilakukan oleh guru secara sadar, teratur, dan bertujuan untuk menyampaikan bahan materinya. Proses penyampaiannya itu diharapkan terjadi perubahan sikap dan perbuatan siswa sesuai dengan tujuan yang ditentukan dalam kurikulum. Sedangkan menurut Roestiyah (dalam Mardiah K, 2017:10) mengatakan guru harus memiliki strategi agar anak didik dapat belajar secara efektif dan efisien, mengenai tujuan yang diharapkan.

Sebagai seorang tenaga pendidikan guru harus dapat menguasai keadaan kelas sehingga tercipta suasana belajar yang menyenangkan. Dalam menghasilkan proses pembelajaran yang berkualitas, seorang guru membutuhkan metode pembelajaran yang baik pula, yang mampu memberikan dampak positif, sehingga dibutuhkan kemampuan guru dalam menerapkan metode pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didiknya. Menurut Suprijono (dalam Heri Hidayat, dkk, 2020:107) mengemukakan bahwa melalui metode pembelajaran yang inovatif di dalam kelas dapat membantu peserta didik mendapatkan informasi, ide, keterampilan, cara berpikir dan mengekspresikan ide.

Metode pendidikan politik yang digunakan guru masih menggunakan metode konvensional yaitu metode

ceramah dengan penggunaan metode ceramah membuat kegiatan belajar bersifat menerima saja karena siswa berperan secara pasif dan juga tidak adanya ruang bagi siswa untuk mengepresikan nilai-nilai dari materi.

Penggunaan metode dalam pelaksanaan pendidikan politik dirancang sedemikian rupa seperti metode diskusi dan bermain peran dengan penggunaan metode tersebut siswa memiliki banyak ruang untuk mengepresikan nilai-nilai seperti siswa memiliki sikap kritis, sikap positif, mampu menghargai adanya perbedaan pendapat, bermusyawarah, bekerjasama dan toleransi, dengan penggunaan metode diskusi dan bermain peran siswa diajak untuk terlibat langsung dalam mengepresikan nilai-nilai yang dipelajarinya. Sehingga untuk itu dibutuhkan metode yang efektif dan efisien, serta bervariasi agar memudahkan pencapaian tujuan pendidikan politik.

c. Media Pendidikan Politik

Media pembelajaran merupakan alat bantu mengajar yang turut mempengaruhi iklim belajar, kondisi, dan lingkungan belajar yang dikondisikan dan dikembangkan oleh guru. Penggunaan media dalam pembelajaran dapat membantu siswa dalam memberikan pengalaman yang bermakna. Sedangkan secara lebih khusus manfaat media pembelajaran menurut Sulkipani, dkk (dalam Anita Trisiana, 2020:32) menjelaskan bahwa dunia pendidikan tentu menggunakan media pembelajaran yang merupakan saluran atau jembatan dari pesan pembelajaran yang disampaikan oleh narasumber kepada penerima pesan. Media pembelajaran meliputi alat

yang secara fisik yang digunakan untuk menyampaikan isi materi pengajaran yang terdiri dari buku, *tape recorder*, film, slide (gambar bingkai), foto, grafik, televisi dan komputer.

Sedangkan secara lebih khusus manfaat media pembelajaran menurut Rohani (dalam Anita Trisiana, 2020:33) adalah (a) penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan, (b) dengan bantuan media pembelajaran, penafsiran yang berbeda antar guru dapat dihindari dan dapat mengurangi terjadinya kesenjangan informasi diantara siswa, (c) proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Media dapat menampilkan informasi melalui suara, gambar, baik secara alami maupun manipulasi sehingga membantu guru menciptakan suasana belajar menjadi lebih hidup, tidak monoton dan tidak membosankan, (d) proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. Dengan media akan terjadinya komunikasi dua arah secara aktif, sedangkan tanpa media guru cenderung bicara satu arah.

Media pendidikan politik yang digunakan guru masih menggunakan media papan tulis dan guru belum bisa menggunakan media yang bervariasi serta jaranganya penggunaan media dikarenakan media yang tersedia di sekolah belum lengkap. Dengan keterbatasan sarana dan prasarana yang membuat guru kesulitan dalam pengembangan media pendidikan politik. Sehingga media pendidikan politik melalui pembelajaran PPKn yang sering digunakan hanya papan tulis dan buku teks sehingga informasi politik yang disajikan guru tidak tersampaikan dengan dengan baik pada siswa. Oleh karena itu, guru

sangat berperan dalam memilih serta menggunakan berbagai media pembelajaran yang bervariasi dalam menyampaikan informasi politik kepada siswa, sehingga lewat media guru akan lebih mudah dalam menyampaikan materi pendidikan politik dan dengan penggunaan media suasana dalam proses pembelajaran akan menjadi lebih menarik dalam mencapai tujuan pendidikan politik.

Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Pendidikan Politik Melalui Pembelajaran PPKn

Menurut Soedijarto (dalam Fauzi, I & Srikantono, 2013: 1) mengartikan bahwa pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan politik yang bertujuan untuk membantu peserta didik untuk menjadi warga negara yang secara politik dewasa dan ikut serta membangun sistem politik yang demokratis. Sedangkan menurut Zamroni (dalam Martini, E dkk, 2018:273) mengatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat berfikir kritis dan bertindak demokrasi melalui aktifitas penanaman kesadaran kepada generasi baru bahwa demokrasi adalah bentuk kehidupan masyarakat yang paling menjamin hak-hak warga masyarakat.

Menurut Sapriya dan Maftuh (dalam Hasan, 2016:13) bahwa PPKn sebagai pendidikan politik berarti program pendidikan ini memberikan pengetahuan, sikap dan keterampilan kepada siswa agar mereka mampu hidup sebagai warga negara yang memiliki tingkat kemelekakan politik (political literacy) dan kesadaran

politik (political awareness), serta kemampuan berpartisipasi politik (political participation) yang tinggi.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa faktor penghambat dalam pelaksanaan pendidikan politik melalui pembelajaran PPKn yaitu keterbatasan referensi atau sumber yang digunakan sehingga tidak memperkaya khasanah keilmuan baik guru maupun siswa. Keterbatasan sarana dan prasarana di sekolah sehingga guru kesulitan dalam pengembangan media pendidikan politik dalam pembelajaran PPKn dan juga guru masih menggunakan metode ceramah dalam pembelajaran. Oleh karena itu peranan seorang guru sangat penting dalam seperti materi yang disajikan dengan kasus-kasus atau fenomena yang ada di lingkungan dan didukung oleh pemilihan metode yang bervariasi serta media yang digunakan dapat menyampaikan informasi politik pada siswa dengan baik.

Upaya Mengatasi Faktor Penghambat Pelaksanaan Pendidikan Politik Melalui Pembelajaran PPKn

Menurut Suprijono (dalam Hidayat, H, dkk, 2020:107) mengemukakan bahwa melalui metode pembelajaran yang inovatif di dalam kelas dapat membantu peserta didik mendapatkan informasi, ide, keterampilan, cara berpikir dan mengekspresikan ide. Sedangkan menurut Soedijarto (dalam Fauzi, I & Srikantono, 2013: 1) mengartikan bahwa pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan politik yang bertujuan untuk membantu peserta didik untuk menjadi warga negara yang secara politik dewasa dan ikut serta membangun sistem politik yang demokratis. Kecermatan guru dalam

memilih media pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang memiliki ciri khas mengemban misi sebagai pendidikan politik dan pendidikan nilai dan moral.

Upaya yang dilakukan ialah pertama, guru harus bisa lebih kreatif dan inovatif dalam mencari dan memperbaharui materi pendidikan politik dari berbagai sumber dan wahana yang ada. Kedua, guru harus lebih selektif lagi dan lebih bervariasi dalam menggunakan berbagai media dan metode pembelajaran PPKn yang dapat menumbuhkan kemelekan politik, kesadaran politik dan keterampilan politik siswa. Ketiga, pemenuhan sarana dan prasarana yang dilakukan oleh sekolah dalam menunjang pelaksanaan pendidikan politik melalui pembelajaran PPKn.

Guru PPKn merupakan aktor sosialisasi politik di sekolah yang berkewajiban untuk memberikan pendidikan politik yang rasional, cerdas, dan santun kepada peserta didik. Oleh karena itu, guru PPKn dituntut untuk memahami dan menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran PPKn serta mampu menggunakan berbagai metode pembelajaran yang demokratis, partisipasif, dan menyenangkan bagi peserta didik dalam mencapai tujuan pendidikan politik.

KESIMPULAN

Pelaksanaan pendidikan politik di SMA Negeri 4 Kerinci melalui pembelajaran PPKn belum dapat mengoptimalkan pelaksanaan pendidikan politik, baik dalam mengolah kegiatan pendidikan politik, pemilihan metode pendidikan politik

partisipasi yang dapat menumbuhkan nilai-nilai demokratis pada diri siswa, pemilihan sumber belajar yang dapat memberikan latihan kewarganegaraan bagi peserta didik, maupun orientasi tujuan pendidikan politik yang diharapkan. Warga negara yang memiliki kemelekan politik, kesadaran politik dan keterampilan politik yang tinggi diperlukan proses pembelajaran yang dapat mendorong peserta didik memiliki pandangan yang komprehensif, berpikir kritis, dan mampu mengambil solusi terhadap berbagai persoalan baik dilingkungan sekolah maupun dilingkungan masyarakat.

Faktor penghambat dalam pelaksanaan pendidikan politik melalui pembelajaran PPKn yakni keterbatasan referensi atau sumber yang digunakan dalam pelaksanaan pendidikan politik, keterbatasan sarana dan prasarana di sekolah sehingga guru kesulitan dalam pengembangan media pendidikan politik dalam pembelajaran PPKn dan guru masih menggunakan metode konvensional yaitu metode ceramah. Upaya yang dilakukan yaitu, guru harus lebih kreatif dalam mencari referensi atau sumber pendidikan politik, guru PPKn harus profesional dalam memilih metode yang bervariasi seperti metode diskusi dan bermain peran dan sekolah juga harus bisa memenuhi sarana dan prasarana seperti infocus, dalam menunjang pelaksanaan pendidikan politik melalui pembelajaran PPKn.

DAFTAR PUSTAKA

- Anita Trisiana. (2020). Penguatan Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Melalui Digitalisasi Media Pembelajaran. *Jurnal*

- Pendidikan Kewarganegaraan*. Vol 10 No 2.
- Ainun, M. (2017). Penanaman Nilai-Nilai Nasionalisme Dan Patriotisme Melalui Materi Sikap Semangat Kebangsaan Dan Patriotisme Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa Dan Bernegara Pada Pembelajaran Pkn Di Sman 1 Pundong. *Jurnal Academy Of Education*. Vol 8 No 2.
- Fauzi, I & Srikantono. (2013). *Pendidikan Kewarganegaraan (Civil Education)*. Kaliwates Jember: Pusat Studi Pemberdayaan Rakyat dan Transformasi Sosial.
- Hasan, Elly. (2016). Pengaruh Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membina Melek Politik Siswa SMAN 2 Purwokerto. *Jurnal Sosiohumaniora* Vol 2 No 1
- Hidayat, H, dkk. (2020). Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Melalui Pendekatan Pembelajaran Kooperatif Tipe Student Team Achievement Divisions di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*. Vol 4 No 1.
- Mardiah Kalsum.(2017). Penggunaan Metode Pembelajaran dalam Peningkatan Hasil Belajar Siswa. *Jurnal Ilmiah Bidang Pendidikan*, Vol 11 No 1.
- Martini, E, dkk. (2018). Pengaruh Pendidikan Politik Terhadap Kesadaran Partisipasi Pemilih Pemula di Smk PGRI 1 Cimahi Jawa Barat. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*. Vol. 2 No. 1.
- Mulyadi, Y.B., & Anyan. (2019). Pendidikan Politik Melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk Meningkatkan Kesadaran Politik Siswa. *Jurnal Inspirasi Pendidikan* Vol. 9 No. 1 Tahun 2019: Hal. 33 – 38.
- Pangalila, Theodorus. (2017). Peningkatan Civic Desposition Siswa melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*. Vol 7, No 1.
- Rahman, A & Suharno. (2019). Pelaksanaan Pendidikan Politik Melalui Pembelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Untuk Meningkatkan Kesadaran Politik Siswa. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Vol 4, No 2. Hal 282-290.
- Rahman, A. (2018). Konsep Dasar Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Pendidikan Ilmu Ilmu Sosial*. Vol 10, No 1. Hal 44-51.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS)